

---

**REFORMASI TAHUN 1998: PERANAN DAN DAMPAKNYA BAGI KOTA SOLO**

**Ikhsan Sirot<sup>✉</sup> & Hamdan Tri Atmaja**

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Semarang-Indonesia

---

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
*Diterima November 2020*  
*Disetujui Desember 2020*  
*Dipublikasikan Desember*  
*2020*

*Keywords:*  
*Reformasi, Politik, Sosial,*  
*Ekonomi*

---

**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai peranan dan dampak yang diterima kota Solo pada reformasi tahun 1998. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana kondisi menjelang reformasi, bagaimana sikap terhadap turunnya presiden Soeharto, serta bagaimana dampak akibat gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik lagi secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan budaya kota Solo ke arah yang lebih baik lagi. Gerakan reformasi ini lahir atas jawaban dari krisis yang melanda berbagai sendi kehidupan masyarakat Solo khususnya. Menarik untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah tulisan sejarah yang dituangkan dalam artikel ini. Artikel ini sendiri menggunakan metode penelitian sejarah dengan di dukung oleh sumber primer serta sumber-sumber lain yang relevan terkait peristiwa ini.

**Abstract**

*This article considers the role and effect that the Solo city received on the reforms of 1998. The major issues in the article are the conditions leading up to the reformation, the attitudes toward president Soeharto decline, and effects of the reformation. The reformation was a movement that would change societies, nationalities, and states in a more constitutional way. That is, life changing in the political, economic, legal, and cultural areas of the Solo city is in an even better direction. The reformation was born with answers to the crises plaguing the joints of Solo society in particular. It is of interest to turn the theme into a written history set out in this article. The article itself employs a method of historical research that is supported by the primary and other relevant sources associated with this event.*

© 2020 Universitas Negeri Semarang

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: [ikhsan.sirot@gmail.com](mailto:ikhsan.sirot@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 negara Indonesia mengalami satu peristiwa yang merupakan salah satu peristiwa penting yang memiliki dampak besar bagi negara, peristiwa yang mungkin sangat sulit dilupakan oleh banyak orang khususnya orang keturunan etnis Tionghoa, yang bisa dikatakan sebagai korban dalam peristiwa besar ini.

Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan peristiwa tersebut, reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, ada perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya.

Reformasi adalah suatu proses ke arah tatanan kehidupan bernegara yang baik, yang meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia (Nugroho, 2015:30).

Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar lagi. Karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Solo mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.

Orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan seorang jenderal yaitu Soeharto. Orde baru berakhir ketika terjadi krisis di segala bidang baik ekonomi maupun moral. Sehingga para pejuang rakyat menghendaki adanya sebuah gerakan reformasi pada tatanan negara Indonesia. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang menjadi awal terjadinya peristiwa reformasi di Indonesia. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12-13 Mei di Jakarta

dan 14-15 Mei di Solo Jawa Tengah. Kerusuhan ini dipicu karena adanya gejolak ekonomi yang melanda serta empat mahasiswa universitas Trisakti yang tertembak saat melakukan aksi pada tanggal 12 Mei 1998.

Salah satu asumsi tentang pemicu kerusuhan Mei 1998 yang paling menonjol adalah akibat terjadinya peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, yaitu sehari sebelum terjadinya kerusuhan tersebut. Bisa jadi asumsi itu benar, tetapi pada kenyataannya asumsi tersebut tidak dapat dipahami dengan sesederhana itu. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak bisa dipahami sebagai sebuah peristiwa yang terpisah dari rangkaian peristiwa sebelumnya, bersamaan maupun dengan yang terjadi setelahnya. Hal itu dikarenakan kerusuhan Mei 1998 merupakan paduan dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melibatkan pertarungan berbagai kepentingan di dalamnya. Situasi ekonomi sendiri juga semakin memburuk. Beberapa kebijakan pemerintah akhirnya justru menjadi beban berat yang harus dirasakan masyarakat. Kenaikan harga begitu tinggi pada hampir seluruh barang, khususnya kebutuhan pokok, berdampak pada terciptanya keresahan masyarakat secara nasional (Zon, 2004).

Kerusuhan yang terjadi solo hampir sama dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta yang berada di wilayah petukangan dan juga kerusuhan yang terjadi di daerah cileduk. Awal peristiwa dan isu-isu yang menyebar juga hampir serupa, dalam aksi perusakan terdapat 3-5 orang memimpin massa, mereka umumnya berbadan kekar, berambut cepak tetapi ada juga yang berambut gondrong. Umumnya mereka mengenakan baju berwarna hitam, celana jeans, dan meneriakkan yel-yel "bakar cina", "jarah cina" Yusuf, 2007:387).

Dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei yang merupakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi serta dampak dari tewasnya empat mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut sebuah reformasi

Hal ini sudah jelas terdapat sentimen rasial dalam berbagai bentuk, mulai dari makian,

hinaan, perusakan, penjarahan, dan pembakaran terhadap toko-toko milik masyarakat keturunan Tionghoa. Sentimen rasial yang paling terlihat dengan adanya tulisan-tulisan "Pribumi Asli" "Pro Reformasi" dan sejenis lainnya pada bangunan-bangunan milik Pribumi, bahkan tidak sedikit toko milik warga keturunan Tionghoa yang ditulisi dengan tulisan tersebut untuk terhindar menjadi korban, sekalipun begitu tetap ada ada toko-toko milik orang Tionghoa yang ditulisi dengan tulisan tersebut untuk terhindar menjadi korban, sekalipun begitu tetap ada toko-toko milik orang Tionghoa yang tetap di rusak sekalipun menggunakan tulisan "milik pribumi".

Reformasi yang dituntut oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia tentu saja tidak terlepas dengan peran penting seluruh pemuda khususnya mahasiswa yang selalu menyuarakan untuk adanya pembaharuan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kala itu telah di pegang oleh presiden Soeharto selama 32 tahun, gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1998 adalah puncak gerakan yang di lakukan oleh kalangan mahasiswa yang bisa dikatakan sebuah gerakan monumental karena dianggap berhasil memaksa presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan yang dilakukan oleh Mahasiswa ini mendapat momentumnya ketika terjadinya krisis moneter yang terjadi, harga-harga kebutuhan yang melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan untuk menurunkan Presiden Soeharto menjadi sebuah agenda nasional oleh gerakan mahasiswa yang menginginkan adanya sebuah reformasi dan hal ini tentu saja mendapat simpati dan juga dukungan dari rakyat.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kondisi menjelang reformasi, selain itu juga untuk mengetahui sikap dari pemerintah kota Solo, sikap dari organisasi-organisasi, dan juga untuk mengetahui dampak dari gerakan reformasi dalam bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonomi khususnya di kota Solo. Selain itu tujuan lain dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran daerah-daerah di Indonesia khususnya kota

Solo terhadap gerakan reformasi yang terjadi hingga reformasi yang di inginkan oleh banyak kalangan masyarakat di Indonesia dapat terwujud.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis rekaman peninggalan masa lampau. Kebenaran sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara mendalam dan kritis, sehingga akan mengungkap sejarah yang objektif (Kuntowijoyo, 2003:12-13). Dalam metode penelitian ini terdapat metode heuristic yang merupakan tahapan pengumpulan sumber sejarah yang relevansi dengan topic atau tema penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan yang berupa mencari, mengumpulkan, menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, baik tertulis maupun lisan. Dokumen sezaman yang dikumpulkan seperti surat kabar dan majalah, seperti: Majalah Adil, Majalah Gatra, dan Majalah Suara Muhammadiyah. Disamping itu artikel ini juga diperkaya beberapa sumber sekunder misalnya karya Arbi Santi, yang berjudul Reformasi Politik Indonesia dan Runtuhnya Rezim daripada Soeharto karya, Diro Aritonang, dan masih banyak lagi.

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian ini adalah kritik sumber. Tidak semua sumber yang didapatkan, terutama dari artikel-artikel dari surat kabar dan majalah bisa langsung digunakan sebagai sumber tetapi harus ditelaah terlebih dahulu. Hasilnya baru diinterpretasikan menjadi rangkaian fakta. Tahapan terakhir dari metode ini adalah historiografi yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan artikel ini merupakan hasil dari penelitian tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **KONDISI MENJELANG REFORMASI**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan juga pembaharuan. Terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan agama. Dengan hal ini reformasi telah memiliki formula baru untuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Reformasi yang akan dimulai dari bidang politik.

Reformasi merupakan bentuk meletusnya masalah-masalah yang telah terjadi di Indonesia sebelumnya, yang telah banyak membuat masyarakat Indonesia menderita dengan berbagai masalah yang terjadi, dan reformasi ini lah yang menurut masyarakat waktu itu dapat menyelesaikan berbagai masalah yang telah terjadi. Kerusakan yang diduga berasal dari SARA, terutama dalam hal agama yang masyarakat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, tetapi hal ini dangan tidak mungkin karena menang kerukunan antar umat beragama di Indonesia sangat luar biasa. Tentu saja kerusakan terjadi akibat adanya kesenjangan sosial yang terjadi.

Serangkaian kerusakan massal bernuansa SARA, yang pecah pada tahun 1995, 1996, dan 1997 memang telah menjadi lembaran kelabu bagi rakyat Indonesia. Hubungan antar umat beragama sempat terganggu dan warga keturunan Cina harus semakin berhati-hati. Sebab, merekalah yang biasanya paling dirugikan tiap kali terjadi kerusakan, walaupun boleh jadi pemicu kerusakan itu sebenarnya bukan mereka. Terdengar dari sudut pandang kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi sebagai biang keladi kerusakan (Amien Rais, 1998). Rambut boleh sama hitam, tapi ketika disuruh menjabarkan pengertian reformasi, bisa keluar pendapat berbeda-beda. Mulai dari yang mengartikannya sebagai kembali ke bentuk awal, meluruskan sesuatu yang bengkok, atau menuju ke bentuk yang lebih baik. Seorang pejabat tinggi dengan nada yang makin malah mengutip sebuah kamus yang menyatakan bahwa reformasi adalah perubahan

dalam waktu cepat dan radikal. Karena itu, pejabat tersebut emoh menggunakan kata-kata reformasi. Perdebatan istilah yang terasa bertele-tele itu memang menunjukkan bahwa perlu atau tidaknya reformasi bagi kehidupan politik di Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra.

Agenda reformasi yang akan direncanakan khususnya dalam bidang politik, yang direncanakan oleh pemerintah lambat laun semakin menemui titik terang untuk segera melaksanakannya, agenda tersebut untuk merubah sistem perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam sistem yang digunakan dalam pemilu. Kini rencana tersebut telah menyebar dan sampai di tangan DPR, yang merupakan wakil masyarakat. Dilandasi oleh cita-cita demokrasi, kaum pengkritik dan pemprotes menggalang kekuatan dalam gerakan demokratisasi. Tuntutan pembaharuan atau perubahan politik menjadi salah satu agenda utama yang dilakukan. Perkembangan tuntutan pembaharuan politik dan mendesaknyanya kebutuhan akan penegakan kepercayaan politik masyarakat, merupakan alasan kuat bagi menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Karena langkah perubahan yang diperlakukan itu adalah untuk mengoreksi sistem kekuasaan yang disentralisasikan, maka sudah pasti arahnya menuju demokratisasi.

Tersebar kabar bahwasannya reformasi hanya bisa dilakukan setelah tahun 2003, kabar ini banyak diberitakan oleh banyak media-media kala itu. Dan hal ini tentu saja langsung mendapat kecaman dari berbagai masyarakat, sebab kabar ini telah dimuat oleh berbagai media massa dan banyak yang menyampaikan bahwa reformasi tidak ada sebelum tahun 2003. Selain mendapat kecaman dari banyak masyarakat Indonesia, yang lebih gawat adalah berbagai kelompok mahasiswa melakukan monitoring terhadap penjelasan dari menteri yang menyampaikan terkait rencana reformasi.

Salah satu agenda reformasi yang direncanakan adalah reformasi dalam bidang politik, terutama yang dibahas dalam agenda reformasi ini adalah pergantian sistem pemilu

dari sistem proporsional menjadi sistem distrik. Tentu saja hal ini langsung mendapat sorotan dari berbagai partai politik yang akan bertarung dalam pemilu berikutnya pada tahun 2003.

Rencana tersebut tentu saja mendapat menjadi pro kontra di kalangan politisi. Wajar bila memang ada pro kontra terhadap rencana reformasi ini, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa pihak yang memang menghendaki adanya reformasi ini yang menilai bahwa adanya kecurangan di dalam pemilu dan ada juga pihak yang memang tidak menghendaki atau sepakat dengan adanya reformasi ini, karena mungkin saja dengan adanya sebuah reformasi ini pihaknya merasa dirugikan dan membuat partainya kalah dalam pemilu berikutnya.

Muhammadiyah yang kala itu merupakan salah satu organisasi besar dan juga memiliki pengaruh penting di setiap lapisan masyarakat, menganggap negara Indonesia perlu segera melakukan sebuah reformasi dan bukan hanya reformasi di bidang politik namun juga melingkupi bidang ekonomi serta sosial. Melalui Amien Rais yang kala itu merupakan ketua umum Muhammadiyah menuntut pemerintah agar menjadikan reformasi sebagai sebuah keharusan yang memang harus segera dilakukan agar masalah yang terjadi serta tuntutan masyarakat terkait KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) segera diberantas di dalam pemerintahan. Dalam melakukan sebuah reformasi tentunya ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan serta ada langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh negara.

Menurut Amin Rais yang merupakan ketua umum Muhammadiyah, ada dua langkah yang harus segera pemerintah lakukan dalam mewujudkan sebuah reformasi. Langkah pertama yaitu, melakukan sebuah reformasi jangka pendek, adalah penanganan krisis. Bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis, bukanlah hal yang sulit dipahami oleh rakyat awam. Harga-harga yang membumbung tinggi, nilai rupiah yang fluktuatif terhadap dolar, dan inflasi dua digit, telah menjadi bagian dari pengalaman keseharian bangsa kita dalam bulan-bulan terakhir ini. Berita-berita mengenai pemutusan hubungan

kerja dan prospek pemutusan hubungan kerja di masa mendatang, telah menghantui para pekerja di kota-kota. Di tengah-tengah nestapa perekonomian ini, pemerintah malah memberi khutbah tentang perlunya mengencangkan ikat pinggang dan mencintai rupiah. Seolah-olah, kesulitan ekonomi terjadi karena ulah masyarakat luas. Masyarakat internasional dan lembaga-lembaganya juga telah menyadarkan kita mengenai besarnya skala dan magnitude krisis perekonomian yang sedang kita alami. (Suara Muhammadiyah 1-15 Mei 1998:9)

Langkah kedua adalah dalam situasi krisis politik dan perekonomian sekarang, penanganan dan pengelolaan yang bersifat jangka pendek, memang merupakan keharusan sebagai jalan keluar. Akan tetapi, kesibukan melaksanakan reformasi jangka pendek, jangan sampai mengabaikan reformasi jangka panjang. Pembinaan daya tanggap dan fleksibilitas ekonomi dan politik jangka panjang, merupakan langkah kedua reformasi yang tidak kalah pentingnya. Jika tidak, maka penanganan krisis tersebut akan menjadi pola utama dan melembaga. Penilaian sebagian pengamat yang mengatakan, bahwa manajemen perekonomian Orde Baru mirip manajemen krisis, akan terbukti kembali. Apabila krisis yang kita alami sekarang tidak disertai dengan usaha-usaha reformasi jangka panjang.

#### **Sikap Terhadap Turunnya Presiden Soeharto**

Agenda reformasi yang sedang berjalan yang pada hakikatnya untuk memperbaiki maupun menjadikan negara ke arah yang lebih baik lagi dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang ekonomi dan juga politik. Karena kedua bidang inilah yang memang sejatinya menjadi fokus utama dalam agenda reformasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dimulai dari reformasi dalam bidang politik yang berusaha untuk mengganti sistem yang akan digunakan di dalam pemilu, yang dimana semula menggunakan sistem proporsional diubah menjadi sistem distrik. Berbagai masalah mulai muncul seiring dengan persiapan pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi politik, mulai dari kasus SARA sampai yang terparah

adalah terdampaknya negara Indonesia dari kurst dollar yang membuat Indonesia mengalami inflasi yang cukup besar dan menyebabkan kenaikan harga di berbagai produk.

Dengan situasi yang sekarang dimana kerusuhan hampir terjadi di berbagai daerah dan semakin banyak yang mendukung presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya tentu saja ini merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh presiden Soeharto, hal ini karena memang sejatinya presiden Soeharto yang masih menjabat beberapa bulan setelah terpilih kembali menjadi presiden untuk periode 1998-2003. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya presiden Soeharto kembali menjadi presiden merupakan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung untuk pak Harto kembali menjadi presiden. Dan hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh presiden Soeharto sebelum kembali terpilih menjadi presiden Indonesia periode 1998-2003, yang dimana seperti data berikut yang menyatakan bahwasannya pak Harto sudah tidak ingin kembali menjadi presiden dan memilih untuk beristirahat.

Lengser keprabon, madeg pandhito adalah ungkapan yang biasanya digunakan oleh seorang raja dalam dunia pewayangan. Seorang raja yang sudah merasa tidak mampu karena renta dan ingin beristirahat selalu mengucapkan lengser keprabon, mundur dari tahtanya. Lengser keprabon ini sebenarnya sudah terucap dari mulut Soeharto ketika berpidato dalam acara ulang tahun Golkar, tanggal 19 Oktober 1997. Isyarat ini sama sekali tidak ditangkap oleh Golkar sendiri. Bahkan, H. Harmoko, baik kapasitasnya sebagai Ketum Umum Golkar maupun sebagai ketua MPR/DPR, seharusnya sudah membaca gelagat ini, tetapi, Harmoko malah semakin kuat mengangkat Soeharto menjadi presiden. Harmoko boleh dikatakan sudah tidak mendengar lagi suara rakyat di luar. (Diro Aritonang, 1999).

Menurut Amien Rais, pernyataan pak Harto yang akan kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden untuk periode 1998-2003. Jelas, bayangan sebagian masyarakat untuk melihat suksesi kepemimpinan nasional,

terlah sirna sama sekali. Kita tidak bisa menyalahkan kemungkinan adanya suksesi. Hal ini disebabkan kata-kata lengser keprabon madeg pandhito yang dilontarkan oleh pak Harto secara langsung. “ memang bagi sebagian orang yang paham akan budaya Jawa, ucapan pak Harto itu langsung bisa disimpulkan sebagai basa-basi politik, tetapi buat saya ucapan lengser dari pak Harto mudah sekali ditebak, sehingga saya tidak kaget jika pak Harto kembali bersedia menjadi presiden lagi,” ucapnya. (Adil 28 Januari-3 Februari 1998:6).

Setelah pada akhirnya presiden Soeharto kembali terpilih menjadi presiden, namun untuk kali ini pak Harto akan dihadapkan dengan permasalahan yang memang sudah ada didepan mata yang merupakan masalah besar dan harus segera ditangani. Terpilihnya kembali pak Harto menjadi presiden dan lambatnya pemerintah untuk menangani masalah yang ada membuat banyak masyarakat geram dan meminta presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya meskipun belum lama terpilih kembali menjadi presiden. Banyak masyarakat menilai bahwa turunnya presiden Soeharto merupakan bentuk reformasi sesungguhnya.

Dalam hal ini tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap pemerintah kota Solo dalam menyikapi permasalahan yang ada serta tuntutan masyarakat untuk presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tentu dalam hal ini pemerintah Solo yang kala itu dipimpin oleh Imam Soetopo sebagai wali kota, selaras dengan keinginan DPRD kota Solo yang memang setuju bahwa presiden Soeharto harus segera turun dari jabatannya. Imam Soetopo menganggap sikap ini di ambil untuk segera mengatasi kerusuhan yang terjadi, agar masyarakat Solo menjadi lebih tenang dan menghentikan kerusuhan yang terjadi. Meskipun sebagai kepala daerah yang harus selalu patuh terhadap presiden Soeharto dalam melaksanakan pemerintahan, tetapi dia menganggap presiden Soeharto memang sudah tidak bisa mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

### **Dampak Akibat Reformasi**

Gerakan reformasi telah meneng. Presiden Soeharto telah turun dari jabatannya. kabinet baru pun telah terbentuk, tapi semua itu belum memberikan manfaat langsung bagi rakyat, dan bisa dibilang malah rakyat semakin miskin. Bukan saja akibat krisis ekonomi berkepanjangan, melainkan juga karena semua orang kini sibuk mengurus politik untuk kekuasaan, sehingga lupa memikirkan bagaimana memberi makan rakyat. Negara Indonesia pada kala itu berada pada kondisi yang tidak normal. Karena apa, ketimpangan ekonomi sangat mencolok sehingga menimbulkan sentiment sosial sangat tinggi terhadap people power. Akibatnya, posisi politik pusat-pusat konsentrasi ekonomi (konglomerat) sangat lemah. Posisi mereka juga diperburuk oleh beban utang luar negeri yang kini sudah jatuh tempo, yang segera mengantarkan mereka ke liang kubur. Sementara itu pemerintah berada pada tekanan- tekanan politik untuk berpihak pada rakyat kecil.

Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah dampak apa yang telah di dapat setelah presdien Soeharto turun dari jabatannya, yang bisa dibilang merupakan bentuk reformasi sesungguhnya dari apa yang diinginkan oleh rakyat terkait agenda reformasi. Tentu saja banyak dampak yang terjadi akibat gerakan reformasi ini, mulai dari dampak di bidang politik yang bisa dikatakan cukup signifikan. Hal ini karena setelah turunnya orde baru banyak mulai muncul partai baru yang tak terbatas dengan berbagai tujuan masing-masing. Selain itu tuntutan pembebasan tapol dan napol islam juga menjadi tuntutan dari beberapa organisasi kepada pemerintah sebagai wujud refoemasi di semua bidang.

Selain dalam bidang politik gerakan refoemasi ini juga berdampak pada bidang sosial, yang dimana hampir setiap masyarakat Indonesia kala itu seperti hilang rasa kemanusiannya. Hal ini karena kejadian penjarahan, pembakaran, pemerkosaan yang terjadi merupakan bentuk dampak sosial yang bisa dikatakan sangat besar, hal ini karena hubungan antara masyarakat pribumi dengan

masyarakat keturunan Tionghoa menjadi tidak akur karena kebanyakan korban penjarahan adalah masyarakat keturunan Tionghoa.

Dampak yang terakhir adalah dampak dalam bidang ekonomi yang dimana setelah terjadinya gerakan reformasi ini khususnya di kota Solo, masih belum tampak menghasilkan keadaan ekonomi yang lebih baik, justru menurut saya keadaan ekonomi di Indonesia malah semakin memburuk karena memang dalam proses reformasi banyak Bank-Bank yang di bekukan karena hutang luar negeri yang sangat banyak dan hal ini membuat keadaan ekonomi semakin parah. Dan tentu saja masih belum bisa menyamai pertumbuhan ekonomi masa orde baru yang bisa dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Bahkan sampai sekarang pun keadaan ekonomi di Indonesia masih jauh dari pada masa orde baru di bawah presiden Soeharto.

### **KESIMPULAN**

Gerakan reformasi yang merupakan sebuah gerakan yang menghendaki adanya sebuah perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya sebuah perubahan kehidupan masyarakat dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta dalam bidang lainnya. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis ekonomi dan politik merupakan faktor utama yang mendorong untuk sebuah reformasi, hingga kedua bidang ini mempengaruhi bidang lain seperti hukum, sosial, budaya serta yang lainnya. Oleh karena itu reformasi dianggap merupakan sebuah agenda yang tidak bisa ditawar lagi dan harus segera dilaksanakan.

Gerakan yang dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat, yang dilandasi dengan semangat perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi ditandai dengan adanya isu- isu yang membuat sebagian masyarakat khususnya mahasiswa merasa harus ada sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk segera mengatasi masalah yang ada. Munculnya berbagai masalah seperti, krisis ekonomi, krisis

SARA, serta krisis politik menjadikan reformasi merupakan sebuah keharusan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Kondisi politik yang mengalami gejolak yang menyebabkan adanya krisis di bidang ekonomi hingga berujung naiknya harga bahan-bahan pokok, membuat masyarakat semakin menderita.

Selain itu tuntutan yang datang dari berbagai elemen masyarakat, membuat pemerintah serta wakil rakyat yaitu DPRD Solo juga mendukung untuk presiden Soeharto segera turun dari jabatannya, karena pemerintah menilai dengan turunnya presiden Soeharto dari kursi presiden, hal ini akan sedikit mengatasi kerusuhan, penjarahan, pembakaran, pemerkosaan yang sedang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan salah satunya adalah kota Solo yang merupakan kota kedua setelah Jakarta yang mengalami kerusuhan paling parah.

Selain bidang politik tentu saja dampak tersebut dirasakan dalam bidang masyarakat, akibat gerakan reformasi yang dilaksanakan membuat kesenjangan sosial menghinggapai masyarakat Indonesia. Hal ini tidak lain karena kerusuhan yang terjadi dan etnis Tionghoa yang banyak menjadi korban akibat adanya gerakan reformasi ini. Selain itu dalam bidang ekonomi saya kira dengan gerakan reformasi yang terjadi, hanya sedikit memberikan dampak terhadap bidang ekonomi. Hal ini karena selama turunnya presiden Soeharto dan dibawah pemerintahan B.J Habibie pemerintah masih belum bisa menciptakan kondisi ekonomi sebelum adanya krisis yang melanda. Selain itu pertumbuhan ekonomi yang terjadi, bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa mengalahkan ketika pemerintahan masa presiden Soeharto.

## REFERENCES

- “Rupiah Melayang Di Pasar Bebas”, Adil 20-26 Agustus 1997.  
“Siapa Di Balik Anjloknya Rupiah?”, Adil 2 September 1997.  
“Mengadili Bankir Bermasalah”, Adil 19-25 November 1997.

“Seandainya Saya Jadi Pak Harto (Amien Rais)”, Adil 3 Februari 1998.

“Amien Rais: Reformasi Sebuah Keharusan”, Suara Muhammadiyah 1-15 Maret 1998.

“80 Trilyun Dana BI Amblas”, Gatra 18 April 1998.

“Kesaksian Amien Rais Tentang Kerusuhan”, Gatra 2 Mei 1998.

“Siapa Di Balik Topeng Hitam?”, Adil 6-12 Mei 1998.

“Ayo Reformasi”, Gatra 9 Mei 1998.

“Rusuh Medan, Padang, Yogya”, Gatra 16 Mei 1998.

“Indonesia Berduka Ratusan Nyawa Tumbal Reformasi”, Adil 20-26 Mei 1998.

## BUKU

Aritonang, Diro. 1999. Runtuhnya Rezim daripada Soeharto. Bandung: Pustaka Hidayah.

Sanit, Arbi. 1998. Reformasi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.